

Form. 1.

SKPD Pelaksana :Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Urusan yang dilaksanakan :

- I. **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**
- A. Jumlah Program sebanyak 4 program dan Kegiatan sebanyak 40 kegiatan
- Rincian Program dan Kegiatan

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	166,800,000	298,301,476	-	-	465,101,476	162,300,000	282,381,691	-	-	444,681,691	95.61
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	-	48,960,000	-	-	48,960,000	-	46,855,291	-	-	46,855,291	95.70
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	153,800,000	-	-	-	153,800,000	149,300,000	-	-	-	149,300,000	97.07
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13,000,000	6,999,960	-	-	19,999,960	13,000,000	6,994,000	-	-	19,994,000	99.97
	4. Pengadaan Alat Tulis Kantor	-	43,620,738	-	-	43,620,738	-	43,593,500	-	-	43,593,500	99.94
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	33,556,500	-	-	33,556,500	-	27,565,800	-	-	27,565,800	82.15
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	5,999,278	-	-	5,999,278	-	5,579,000	-	-	5,579,000	92.99
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	4,500,000	-	-	4,500,000	-	2,760,000	-	-	2,760,000	61.33
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	-	17,490,000	-	-	17,490,000	-	17,414,100	-	-	17,414,100	99.57
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	53,200,000	-	-	53,200,000	-	47,855,000	-	-	47,855,000	89.95
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	70,975,000	-	-	70,975,000	-	70,765,000	-	-	70,765,000	99.70
	11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	13,000,000	-	-	13,000,000	-	13,000,000	-	-	13,000,000	100.00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42,000,000	92,480,612	39,600,000	39,670,475	213,751,087	42,000,000	-	39,600,000	39,670,475	212,586,186	99.46
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	16,970,475	16,970,475	-	-	-	16,970,475	16,970,475	100.00
	2. Pengadaan Meubiler	-	-	-	22,700,000	22,700,000	-	-	-	22,700,000	22,700,000	100.00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	25,000,000	-	25,000,000	100.00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42,000,000	92,480,612	-	-	134,480,612	42,000,000	91,315,711	-	-	133,315,711	99.13
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	14,600,000	-	14,600,000	-	-	14,600,000	-	14,600,000	100.00
III.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	76,700,000	853,718,115	-	-	930,418,115	73,200,000	839,097,983	-	-	912,297,983	98.05
	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	29,927,000	-	-	29,927,000	-	29,240,683	-	-	29,240,683	97.71
	2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	-	14,050,000	-	-	14,050,000	-	13,502,800	-	-	13,502,800	96.11
	3. Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)	9,500,000	490,500,000	-	-	500,000,000	6,000,000	486,077,000	-	-	492,077,000	98.42
	4. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	12,000,000	37,748,900	-	-	49,748,900	12,000,000	34,655,450	-	-	46,655,450	93.78
	5. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan DistribusiPasokan Pangan dan HBKN)	34,500,000	20,155,815	-	-	54,655,815	34,500,000	19,886,050	-	-	54,386,050	99.51
	6. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	-	15,984,000	-	-	15,984,000	-	15,635,750	-	-	15,635,750	97.82
	7. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	-	69,634,000	-	-	69,634,000	-	69,469,200	-	-	69,469,200	99.76
	8. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	-	26,241,200	-	-	26,241,200	-	26,118,700	-	-	26,118,700	99.53

	9. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	-	45,150,400	-	-	45,150,400	-	43,407,350	-	-	43,407,350	96.14
	10. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	12,000,000	11,913,000	-	-	23,913,000	12,000,000	10,612,750	-	-	22,612,750	94.56
	11. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (TTI)	-	24,434,000	-	-	24,434,000	-	24,211,500	-	-	24,211,500	99.09
	12. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	21,949,000	-	-	21,949,000	-	21,789,300	-	-	21,789,300	99.27
	13. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	-	19,374,000	-	-	19,374,000	-	17,869,950	-	-	17,869,950	92.24
	14. Penunjang DAK Ketahanan Pangan	8,700,000	26,656,800	-	-	35,356,800	8,700,000	26,621,500	-	-	35,321,500	99.90
VI.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	578,293,300	-	-	578,293,300	-	568,367,498	-	-	568,367,498	98.28
	1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	-	98,850,000	-	-	98,850,000	-	98,519,925	-	-	98,519,925	99.67
	2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	-	68,865,000	-	-	68,865,000	-	68,633,150	-	-	68,633,150	99.66
	3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	-	50,717,500	-	-	50,717,500	-	49,422,950	-	-	49,422,950	97.45
	4. Penyusunan Pola Pangan Harapan	-	13,195,900	-	-	13,195,900	-	11,468,650	-	-	11,468,650	86.91
	5. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan	-	67,945,000	-	-	67,945,000	-	66,296,000	-	-	66,296,000	97.57
	6. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	-	81,539,000	-	-	81,539,000	-	79,423,950	-	-	79,423,950	97.41
	7. Model Percontohan Keamanan Pangan	-	32,108,000	-	-	32,108,000	-	31,197,950	-	-	31,197,950	97.17
	8. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, bergizi, Seimbang, dan Aman)	-	75,593,500	-	-	75,593,500	-	75,153,000	-	-	75,153,000	99.42
	9. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	-	75,162,400	-	-	75,162,400	-	74,075,050	-	-	74,075,050	98.55
	10. Penyusunan Ranperda Tentang Ketahanan Pangan	-	14,317,000	-	-	14,317,000	-	14,176,873	-	-	14,176,873	99.02
	JUMLAH	285,500,000	1,822,793,503	39,600,000	39,670,475	2,187,563,978	277,500,000	1,689,847,172	39,600,000	39,670,475	2,137,933,358	97.73

B. Tingkat Pencapaian Standar pelayanan Minimal

- * Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan dari 7 indikator yang ditetapkan
- Indikator yang tercapai :
 1. Indikator ketersediaan energi dan protein perkapita dengan capaian 156,21% dari target
 2. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan capaian 100% dari target
 3. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan dengan capaian 100%
 4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar dengan capaian 100%
 5. Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian 100% dari target

C. Kesesuaian Perencanaan Daerah

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki antara lain :

- RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD
- RKA-SKPD
- DPA

Jumlah program yang diakomodir dalam RENJA SKPD adalah 5 (lima) program sedangkan Jumlah Program yang dalam dalam RKA dan DPA SKPD adalah 4 (empat) program

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA	Ada	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yang terdiri dari : - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA	4 Jenis Dokumen	
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs

				- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program		
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	80%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program	80%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD ybs

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- 1. Permasalahan
 - * Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan masih jauh dari ideal yaitu 84,0%
 - * Jenis bahan pangan yang bersumber dari sektor perikanan dan jajanan anak sekolah masih ditemukan kandungan zat aditif yang membahayakan kesehatan
- 2. Solusi
 - * Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber konsumsi pangan keluarga,
 - * Sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang, sehat dan aman.
 - * Mengoptimalkan fungsi tim terpadu keamanan pangan dan tim teknis keamanan pangan dalam mengawasi keamanan pangan segar, jajanan anak sekolah
 - * Memprioritaskan penyediaan anggaran untuk pemenuhan cadangan pangan sesuai target yang ditetapkan
 - * Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan pada nagari yang terindikasi masuk kategori rawan pangan

D. Hal-hal yang perlu dilaporkan

- * Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan dari 7 indikator yang ditetapkan
- Indikator yang tercapai :
- 1. Indikator ketersediaan energi dan protein perkapita dengan capaian 156,21% dari target
 - 2. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan capaian 100% dari target
 - 3. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan dengan capaian 100%
 - 4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar dengan capaian 100%
 - 5. Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian 100% dari target
- Indikator yang belum tercapai
- 1. Penguatan Cadangan Pangan dengan capaian 24,125% dari target
 - 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan capaian 103,70% dari target

E. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (kurang mencukupi)

1. Kurangnya lemari arsip untuk penyimpanan arsip keuangan
2. Banyaknya printer yang tidak bisa digunakan karena rusak berat

F. I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1. Permasalahan
 - * Ketersediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih sebesar 48,25 Ton dari 200 Ton yang ditargetkan (24,125%)
 - * Masih ada nagari yang masuk kategori rawan pangan yaitu : 2 nagari (Prioritas 1), 9 nagari (Prioritas 2), 21 nagari
2. Solusi
 - * Memprioritaskan penyediaan anggaran untuk pemenuhan cadangan pangan sesuai target yang ditetapkan
 - * Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan pada nagari yang terindikasi masuk kategori rawan pangan

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Permasalahan
 - * Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan sudah melebihi target yaitu 84,0%
 - * Jenis bahan pangan yang bersumber dari sektor perikanan dan jajanan anak sekolah masih ditemukan kandungan zat aditif yang membahayakan kesehatan
2. Solusi
 - * Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber konsumsi pangan keluarga,
 - * Sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang, sehat dan aman.
 - * Mengoptimalkan fungsi tim terpadu keamanan pangan dan tim teknis keamanan pangan dalam mengawasi keamanan pangan segar, jajanan anak sekolah serta daging dan ikan

G. Hal-hal yang perlu dilaporkan

- * Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan dari 7 indikator yang ditetapkan
- Indikator yang tercapai :
1. Indikator ketersediaan energi dan protein perkapita dengan capaian 156,21% dari target
 2. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan capaian 100% dari target
 3. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan dengan capaian 100%
 4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar dengan capaian 100%
 5. Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian 100% dari target
- Indikator yang belum tercapai
1. Penguatan Cadangan Pangan dengan capaian 21,125% dari target
 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan capaian 103,70% dari target



TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: WAJIB NON PELAYANAN DASAR

	APEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	100%	Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Tidak Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 18 (delapan belas) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 2. SOP ttg Penanggulangan Rawan Pangan 3. SOP ttg Pengelolaan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat 4. SOP ttg Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 5. SOP ttg Harga dan Pasokan 6. SOP ttg Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM_) 7. SOP ttg Informasi harga dan Pasokan 8. SOP ttg Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) 9. SOP ttg Panel dan Pemantauan harga pangan pokok 10. SOP ttg Pengembangan Usaha Pangan 11. SOP ttg Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan, dan HBkN 12. SOP ttg Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 13. SOP tta Penandaan Keamanan Pangan 14. SOP ttg Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan 15. SOP ttg Lomba Cipta menu B2SA tingkat Kabupaten, Propinsi, dan Nasional 16. SOP ttg Pangan Segar 17. SOP ttg teknologi pengolahan pangan lokal 18. SOP ttg Penanganan Keamanan Pangan tingkat Produsen dan Konsumen	100%	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN ttg SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 (satu) - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 (satu)	100%	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 12	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , 21 sebanyak personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.789 personil	0.31%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2019
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org Total pejabat SKPD 12 org	50%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA	Ada	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yang terdiri dari : - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA	4 Jenis Dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan	12	Jumlah Program RENJA	Jumlah Program RENJA	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA	100%	Mengacu dokumen RKA-

		Pelaksanaan Program dan Anggaran		SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam	SKPD, sebanyak 4 program - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.		SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2019.
--	--	----------------------------------	--	-------------------------------------	---	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.381.629.882,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.860.991.871.831,39	0.24%	Mengacu LKD tahun 2019 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 39.670.475,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 4.381.629.882,00	0.91%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 39.600.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 2.147.893.503	1.84%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 39.600.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 4.381.629.882,00	0.90%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Operasional	Ada sebanyak 5 jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK, LPE da LO)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada, Buku Inventaris Barang, Kartu Inventaris Barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 380 asset.	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media 4. Running Text 5. Web OPD	Jumlah sebanyak : 5 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

Form 2
SDM Pendukung Program dan Kegiatan :

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Nama / NIP	Jabatan			Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat Pim)			
		Nama Jabatan	Struktural	Fungsional Umum	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3			4					5		6				7			
1	Alfis Basyir, S.E., M.Hum. NIP. 19700731 199403 1 004	Kepala Dinas Pangan	Eselon II	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
2	Amrisa, S.Pd., M.M. NIP. 19690921 199803 1 004	Sekretaris Dinas Pangan	Eselon III	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
3	Afriman Julta, S.Pi 19700703 200212 1 011	Kabid Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Eselon III	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
4	Agustina Rahmadani S.St, MM 19790810 200312 2 006	Kabid Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Eselon III	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
5	Despita Irawati, S.P NIP. 19711225 200701 2 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
6	Rahmi Hamda Sari, S.S.T 19850921 200501 2 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
7	Arman, SP 19620413 198703 1 004	Kasubid Kerawanan dan Ketersediaan Pangan	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
8	Fetmawati, SP 19730703 200801 2 004	Kasubid Distribusi Pangan	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
9	Mardoni, SE 19780320 200701 1 006	Kasubid Ketersediaan Pangan	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
10	Yulia Novita, SKM 19760709 200303 2 001	Kasubid Keamanan Pangan	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
11	Erliza Desiliani,SH,MM 19721229 199403 2 002	Kasubid Pola Konsumsi Pangan	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
12	Reni Susanti, S.Pi., M.Si 19750417 200701 2 003	Kasubid Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Eselon IV	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
13	Hamijon, SP,M.Si. 19641231 199701 1 001	Fungsional Umum	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
14	Syamsuniar 19620112 198602 2 002	Pengadministrasi Kepegawaian	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
15	Syaifuddin, A 19720104 199308 1 002	Pengadministrasi Kepegawaian	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
16	Asmidarwati 19620125 198602 2 001	Pengadministrasi Keuangan	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
17	Yuliarsyam, S.E. NIP. 19730107 200604 2 004	Bendahara	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
18	Ruli Ika Faldi	Pengadministrasian Umum	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	19831201 201001 1 019					
19	Rosi Nora Mailiza, S.IP 19770502 200701 2 010	Pengawas Harga Pangan	- v	- v	- -	- v
20	Azmanita, SH 19631013 198602 2 003	Penganalisis Pangan	- v	- -	- v	- v
21	Merlyn Syahputri 19840803 201001 2 007	Pengolah Data	- v	- v	- v	- v


KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

Lampiran III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

SKPD : Dinas Pangan

NO (1)	ASPEK (2)	FOKUS (3)	No. (4)	IKK (5)	RUMUS / PERHITUNGAN (6)	Jenis Data (Tahun 2018) (7)	Capaian Kinerja (8)	Keterangan (9)
2	KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAERAH	Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak-		
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak - - -	-	

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

#REF!
#REF!
#REF!

Form 5:

LAMPIRAN III.3
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

DINAS PANGAN

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
13	Pangan	80	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	$\frac{45,25 \text{ ton}}{209,807 \text{ ton}} \times 100\%$	22%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pangan
		81	Tersedianya infrastruktur penrgudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		1 Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Bulog	Pembangunan Gedung gudang cadangan pangan pemerintah 2012 berlokasi di kampung Pasir Nan Panjang Kecamatan Sutera ukuran 9m x 20 m dengan kapasitas 100 ton

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

- A. SKPD Pelaksana : Dinas Pangan
- B. Forum Koordinasi : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- C. Materi Koordinasi : Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- D. Instansi Vertikal yang terlibat : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan
2. BULOG Kabupaten Pesisir Selatan
3. POLRES Kab. Pesisir Selatan
- E. Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran APBD Kab. Pesisir Selatan, dengan Jumlah Anggaran Rp 67.945.000,-
- F. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan : 1 (satu) kegiatan
- G. Hasil dan Manfaat Koordinasi : 1 (satu) Rekomendasi
- H. Tindaklanjut Hasil Koordinasi : Dilaksanakan oleh SKPD terkait
- I. SDM Pendukung Program dan Kegiatan :
- * Jumlah Pegawai : 21 Orang PNS
 - * Kualifikasi Pendidikan : terlampir
 - * Pangkat atau Golongan : terlampir
 - * Jumlah Pejabat Struktural : 12 Orang

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

Form 9.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

- A. SKPD Pelaksana : Dinas Pangan
B. Tabel Program dan Kegiatan :

NO	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP / CUKUP /MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
I.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)						
1.	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	69,634,000	69,469,200	Dinas Pangan	Keuangan : 99,76 % - Fisik : 100 %	Top Down	Lengkap

- C. Mitra yang diajak kerjasama : Perum BULOG Divre Sumatera Barat
D. Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 18 Ayat 3
E. Bidang Kerjasama : Pengadaan dan Pemeliharaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah
F. Jangka Waktu : -
G. Hasil (Output) dari Kerjasama : Beras Cadangan Pemerintah sebanyak 5 Ton
H. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
* Tidak Ada
2. Solusi
* Tidak Ada
I. SDM Pendukung Program dan Kegiatan
* Jumlah Pegawai : 21 Orang PNS
* Kualifikasi Pendidikan : terlampir
* Pangkat atau Golongan : terlampir
* Jumlah Pejabat Struktural : 12 Orang
* Jumlah Pejabat Fungsional : 0 Orang

